

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**



**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat terselesaikan yang selanjutnya menjadi pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta antara lain Penegakan Perda, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Anggaran Tahun 2023, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta pada akhir tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Purwakarta, 03 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Dasar Pemikiran	3
	1.4. Permasalahan yang dihadapi	3
	1.5. Prioritas Pembangunan	3
	1.6. Struktur Pemerintahan	4
BAB II	RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan	5
	2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	5
	2.5. Kebijakan dan Program	7
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2023	9
	3.1. Sasaran yang dipilih	9
	3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	9
	3.3. Program yang terpilih	11
BAB IV	PENUTUP	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

### 1.3 **Dasar Pemikiran**

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2023 ini, adalah :

1. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
2. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sesuai Program dan Kegiatan.
3. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

### 1.4. **Permasalahan yang Dihadapi**

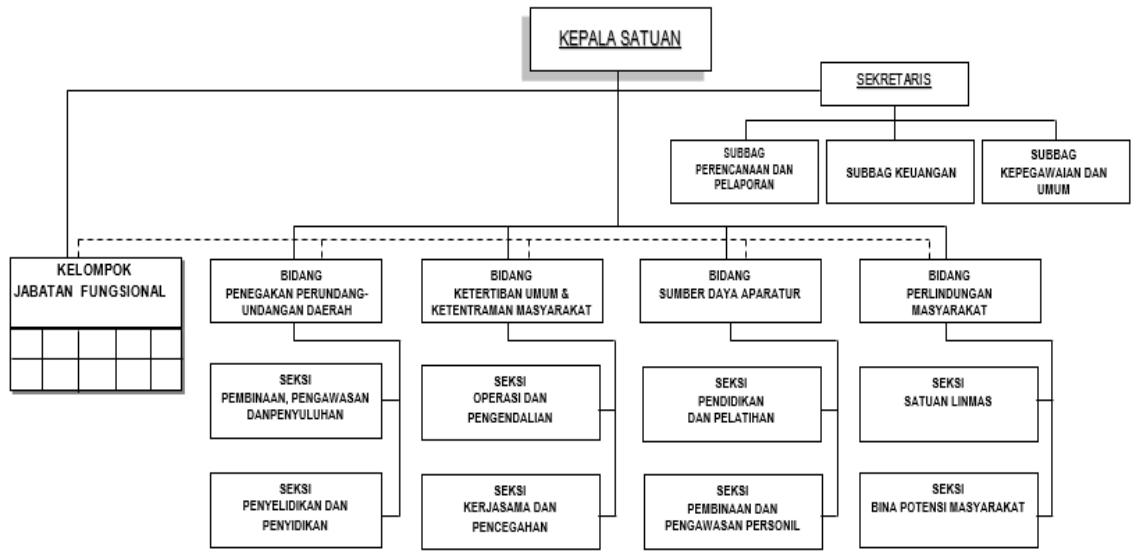
- a. Lemahnya tingkat koordinasi dan kolaborasi antar Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditandai dengan belum maksimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) pada Dinas pengampu Perda;
- b. Masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan dan pengawasan implementasi Perda Kabupaten Purwakarta yang belum maksimal;
- f. Sejumlah Perda dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

### 1.5. **Prioritas Pembangunan**

Mendukung Misi Kabupaten Purwakarta yang ke-2 (dua) yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 ke dalam 2 (dua) program 9 (Sembilan) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) SubKegiatan.

### 1.6. Struktur Pemerintahan

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si  
810623 200604 1 008

## **BAB II**

### **RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **2.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “*Mewujudkan Purwakarta Istimewa.*”

#### **2.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta di atas disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Penyusunan RPMJD Perubahan Tahun 2018-2023; sehingga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta masuk pada Misi Ke-2 RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, yakni “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.”

#### **2.3. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018– 2023, sebagai berikut :

#### **MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.**

Tujuan dari MISI II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

#### **2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 :



**MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.**

Tujuan dari MISI II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

Sasaran dari tujuan MISI II, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran dalam Pelayanan yang Efektif dan Efisien;  
*Indikator Kinerja Sasaran :*
  1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
  2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran.
  
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Pelaksanaannya;  
*Indikator Kinerja Sasaran :*
  1. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum.
  2. Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani.
  
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta  
*Indikator Kinerja Sasaran :*
  1. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian / penertiban trantibmas.
  2. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah.
  
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta  
*Indikator Kinerja Sasaran :*
  1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP

*Indikator Kinerja Sasaran :*

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat / bimtek Satpol. PP yang diselenggarakan.
2. Persentasi anggota Satpol. PP yang dibina

6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta

*Indikator Kinerja Sasaran :*

1. Persentase anggota Satlinmas yang dibina.
2. Jumlah pembinaan potensi masyarakat.

## 2.5 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program. Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Pelaksanaanya	1. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum 2. Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

	3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	<p>1. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas</p> <p>2. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah</p>	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP	<p>1. Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol. PP</p> <p>2. Persentasi anggota Satpol. PP yang dibina</p>	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	<p>1. Persentase anggota Satlinmas yang dibina</p> <p>2. Jumlah pembinaan potensi masyarakat</p>	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

#### **3.1 Sasaran Yang Terpilih**

Sasaran yang terpilih di tahun 2023 ini adalah sebanyak 6 (Enam) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta
5. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta

Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2018-2023, sehingga apa yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### **3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih**

Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN TERPILIH</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH</b>
1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanankantoran

2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya	1. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum 2. Persentase Kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang ditangani
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	1. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban transibmas 2. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara
5. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Satpol. PP	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP. yang diselenggarakan 2. Persentasi anggota Satpol PP yang dibina
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	1. Persentase anggota Satlinmas yang dibina 2. Jumlah pembinaan potensi masyarakat

### 3.3 Program Yang Terpilih

Jumlah program pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) program yang didukung 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) SubKegiatan, sehingga total pagu indikatifnya **Rp. 21.813.975.402,00**. Ke 2 (dua) Program tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah tabel daftar program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 (terlampir) :

## Daftar Program, Kegiatan dan SubKegiatan Berdasarkan DPA Tahun Anggaran Murni 2023

No	Program / Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.243.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.104.000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	11.785.097.418	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.744.300	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	288.052.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.019.300	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.044.300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	50.000.000	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	42.811.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	20.266.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	282.084.700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	66.231.500	
	Pelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.019.465	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	57 Unit	112.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 Unit	57.785.800	



<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	92.008.733	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	6.101.089.736	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	30 Unit	518.900.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	19.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitas	2 Unit	253.600.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah</b>				
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pegawaian	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	95 Kasus	491.123.650	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusushan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	30 Kasus	152.425.000	

		Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang dilakukan Penindakan			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	210.687.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan	100.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	93.999.000	
<b>2</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>				
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Kegiatan	202.765.440	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	22 Laporan	75.000.00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang Tertangani/Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	5 Laporan	304.148.160	

## Daftar Program, Kegiatan dan SubKegiatan Berdasarkan DPA Tahun Anggaran Perubahan 2023

No	Program / Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.243.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.064.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.104.000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	11.183.661.420	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.744.300	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	301.802.500	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.019.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.044.300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	50.000.000	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	42.811.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	20.266.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	307.878.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	85.731.500	
	Pelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.748.000	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	57 Unit	122.015.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 Unit	117.760.800	

<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	92.008.733	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	5.731.089.736	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	30 Unit	641.355.300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	64.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitas	2 Unit	239.661.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah</b>				
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pegawaian	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	95 Kasus	641.123.650	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusushan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	30 Kasus	302.425.000	

		Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang dilakukan Penindakan			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	260.687.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan	100.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	93.999.000	
<b>2</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>				
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Kegiatan	202.765.440	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	22 Laporan	75.000.00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang Tertangani/Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	5 Laporan	304.148.160	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman semua jajaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023. Maka perlu dicermati indikator kinerja dan target kinerja dalam hal pencapaiannya.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 05 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta**



**AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**  
0623 200604 1 008